

BAB I

PENDAHULUAN

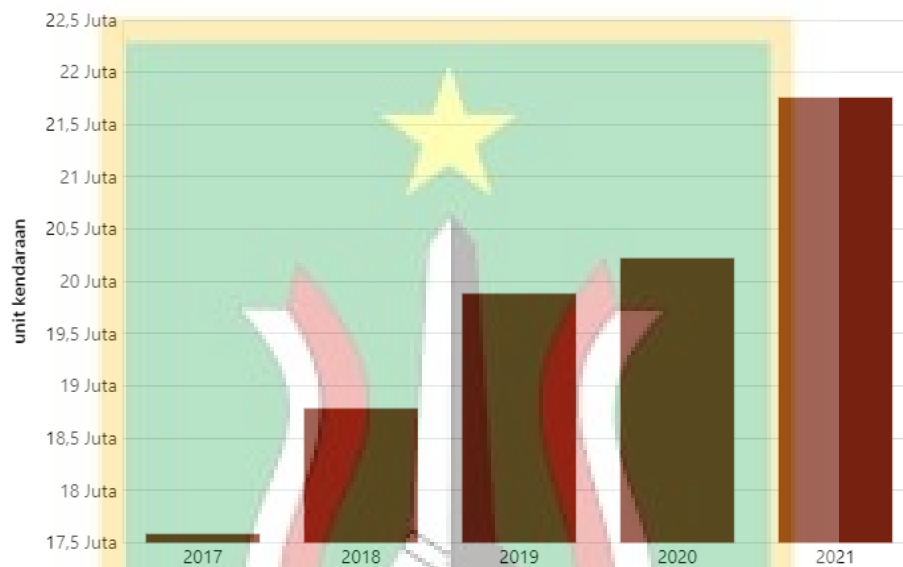
1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemacetan lalu lintas merupakan hal yang lumrah terjadi di kawasan yang memiliki tingkat kegiatan, penggunaan lahan serta jumlah masyarakat yang sangat tinggi. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyak pengguna jalan yang tidak tertib, pemakai jalan arus, kurangnya petugas lalu lintas yang mengawasi, adanya mobil yang parkir di badan jalan, permukaan jalan tidak rata, tidak ada jembatan penyebrangan dan tidak ada pembatas jenis kendaraan (Boediningsih, 2011). Selain itu, faktor lain yang berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas adalah kesenjangan antara jumlah penduduk yang terus bertambah dan terbatasnya infrastruktur di suatu wilayah. Dengan meningkatnya jumlah pemilik kendaraan setiap tahunnya, jalan yang ada mungkin tidak lagi mampu menampung lonjakan penduduk. Selain itu, bertambahnya populasi menyebabkan peningkatan aktivitas dan pergerakan masyarakat, sehingga memperburuk masalah kemacetan lalu lintas.

Kemacetan yang terjadi di Jakarta telah menjadi sebuah tantangan berat yang tidak hanya berdampak pada warga Jakarta namun juga seluruh masyarakat Indonesia. (Hoeve, 1990) juga mengatakan bahwa kemacetan merupakan masalah umum, masalah ini muncul sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan dan peningkatan kepadatan penduduk, sehingga menyebabkan pergerakan kendaraan menjadi lamban. Kesulitan kemacetan cenderung terlihat jelas di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk melebihi 2 juta jiwa. Biasanya, terjadinya kemacetan lalu lintas hampir tiada henti sehingga menimbulkan tingkat ketidaknyamanan yang sangat besar bagi pengguna jalan di ibu kota (Al-Adha dan Atmojo, 2023:66). Selain itu, penggunaan kendaraan pribadi yang semakin mengalami peningkatan menyebabkan dampak kemacetan yang menjadi makanan sehari-hari oleh penduduk DKI Jakarta.

Kemacetan di Jakarta terjadi dikarenakan beberapa faktor sosial, seperti tingginya jumlah kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan sering kali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas terjadi karena kapasitas jalan tidak bisa

menampung semua kendaraan sehingga kemacetan tidak bisa dihindari. Pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan juga menjadi salah satu faktor penyebab dari kemacetan lalu lintas. Biasanya mereka mengambil trotoar sebagai tempat berjualan sehingga pejalan kaki tidak lagi bisa melewati trotoar, melainkan jalan raya. Hal tersebut tentunya membahayakan keselamatan para pejalan kaki dan pengguna jalan lalu lintas. Berikut adalah grafik jumlah kendaraan mengenai jumlah kendaraan bermotor :



Gambar 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta
Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta secara konsisten dan nyata dari tahun 2017 hingga tahun 2021, seperti terlihat pada grafik di bawah ini (BPS, 2022). Pada tahun 2021, jumlah kendaraan di Jakarta diperkirakan mencapai kurang lebih 21,75 juta unit, yang berarti tumbuh signifikan sebesar 7,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara kendaraan-kendaraan tersebut, sepeda motor mendominasi lanskap, menyumbang 75,92% dari total jumlah kendaraan di Jakarta. Di urutan berikutnya adalah mobil, yang merupakan 18,89% dari populasi kendaraan. Kendaraan jenis truk mempunyai proporsi yang lebih kecil, yaitu 3,61% dari total. Terakhir, bus memiliki porsi terkecil, yaitu hanya 1,57% dari keseluruhan jumlah kendaraan di DKI Jakarta pada tahun 2021. Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW),

Edison Siahaan, menjelaskan masalah kemacetan di Jakarta terutama disebabkan oleh kurangnya populasi kendaraan yang efektif. tindakan pengendalian.

Bertambahnya jumlah penduduk dan kepemilikan kendaraan menyebabkan tingginya tingkat kepadatan lalu lintas di kawasan Jabodetabek. Mobilitas penduduk yang sangat tinggi akhirnya berdampak pada rutinitas kemacetan yang dirasa kian bertambah parah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan berbagai rekayasa sosial untuk bisa mengatasi kemacetan ini. Rekayasa sosial ialah rangkaian sistematis yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Rekayasa sosial digunakan untuk mengelola perubahan sosial dan mengatur perkembangan masa depan dan perilaku masyarakat. Rekayasa sosial transportasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan sosial dalam konteks transportasi. Dasar ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan transportasi dan lalu lintas dan berfungsi sebagai landasan untuk mengambil keputusan yang baik dalam upaya meningkatkan sistem transportasi meliputi analisis lalu lintas, perencanaan transportasi umum, penggunaan tanah dan zonasi, serta teknologi transportasi.

Rekayasa sosial juga sekaligus menjadi pemahaman tentang regulasi dan kebijakan transportasi, aspek lingkungan, serta prinsip-prinsip keamanan jalan. Ini semua merupakan fondasi yang digunakan oleh para profesional untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Rekayasa sosial ini dimulai dengan mengubah paradigma pembangunan perkotaan menuju kota yang lebih manusiawi seperti memprioritaskan pejalan kaki, angkutan umum ramah lingkungan dan pesepeda (Nusantara, I, K, 2022).

Indonesia saat ini sedang memulai pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan, mengambil inspirasi dari negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Transportasi ramah lingkungan mengacu pada jaringan pergerakan dan konektivitas dalam kawasan perkotaan yang mengandalkan layanan transportasi yang tidak mengeluarkan gas rumah kaca atau asap buangan pembakaran. Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen khusus untuk mengurangi emisi gas buang dan telah mengambil berbagai tindakan untuk mencapai tujuan ini. Tindakan-tindakan ini mencakup peningkatan

kesadaran dan mendorong penerapan sistem transportasi berbasis energi yang efisien dan terbarukan.

Selain itu Provinsi DKI Jakarta membuat rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem Gajil-Genap, Jalan Satu Arah, Jalan Layang dan Contraflow. Provinsi DKI Jakarta juga membuat rekayasa sosial di bidang transportasi publik terpadu berupa Pembangunan MRT, LRT, Trans Jakarta, KRL Commuter Line, dan Jak Lingko. Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan kampanye untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, khususnya sistem TransJakarta yang saat ini memiliki 52 bus listrik dan berencana menambah 100 unit lagi pada akhir tahun 2023. Sistem TransJakarta juga terintegrasi dengan sistem LRT dan MRT. Pemerintah Pusat memberikan dukungan dengan membangun LRT Jabodebek sebagai bagian dari program Proyek Strategis Nasional. Jalur ini akan menghubungkan Stasiun Dukuh Atas ke Stasiun Harjamukti di Depok dan Stasiun Dukuh Atas ke Stasiun Jati Mulya di Bekasi (Dishub DKI Jakarta, 2021).

Sistem transportasi publik yang dikembangkan integrasi fisik, layanan, manajemen, serta sistem pembayaran. Integrasi ini mencakup BRT, MRT, LRT, Transjakarta dan Mikrotrans. Sistem transportasi publik terintegrasi ini tidak hanya solusi untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta, namun juga untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat Jakarta, terutama daerah-daerah yang sulit di jangkau oleh transportasi lainnya. Pada tahap awal penerapan sistem transportasi umum terintegrasi ini, kami akan mengevaluasi apakah infrastruktur transportasi umum yang ada memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kami akan menilai efektivitas pembayaran kartu e-wallet dan mengkaji bagaimana masyarakat beradaptasi dengan metode pembayaran baru ini (Zahra et al., 2020).

Selain mengatasi permasalahan terkait kemacetan lalu lintas, pembentukan layanan transportasi yang komprehensif juga harus mengutamakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat pengguna transportasi publik. Hal ini penting karena pembebasan Jakarta dan kota-kota sekitarnya dari kemacetan merupakan tujuan utama dalam mencapai status kota yang berkelanjutan dan sadar sosial (Sitorus, A.

M. H. 2022). Untuk mencapai predikat berkelanjutan sosial, program yang dilakukan harus memberikan keadilan sosial seperti distribusi merata pada beban lingkungan, sosial, dan ekonomi serta manfaat pembangunan (Fainstein, 2014). Seperti pandangan (Campbell, 2021) yang mengungkapkan bahwa prinsip keadilan sosial dapat mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks transportasi, keadilan sosial memainkan peran penting dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Khususnya, dalam hal transportasi, keadilan sosial memastikan bahwa setiap individu memiliki hak mendasar untuk mengakses, menempati, dan memanfaatkan ruang kota secara fisik, sehingga memungkinkan mereka untuk sepenuhnya terlibat dan mengambil bagian dalam kehidupan kota yang dinamis.

Menggunakan sistem transportasi publik masyarakat diharapkan dapat menikmati tarif integrasi yang sangat menguntungkan, misalnya dalam menggunakan transportasi Mikrotrans. Transportasi Mikrotrans ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Transportasi Mikrotrans 0 rupiah memungkinkan pengguna untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum dengan biaya yang terjangkau bahkan gratis, sehingga dapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi masyarakat Jakarta dengan mengakses transportasi umum.

Maka dari itu, susunan penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai “Respon Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Publik Terintegrasi di DKI Jakarta”. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil analisis bentuk rekayasa yang sudah dan akan dilakukan guna mengurangi kemacetan di Jakarta dan mendeskripsikan respons masyarakat mengenai transportasi publik terintegrasi di Provinsi Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa faktor utama terjadinya kemacetan lalu lintas di Jakarta disebabkan oleh sangat tingginya penggunaan kendaraan pribadi, dan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari sejauh mana respons masyarakat terhadap layanan transportasi publik terintegrasi di DKI Jakarta.

Dengan menggunakan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang akan memandu jalannya penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana layanan sistem transportasi publik terintegrasi oleh DKI Jakarta?
2. Bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan sistem pelayanan transportasi publik terpadu di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka terdapat tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi oleh DKI Jakarta.
2. Menganalisis respons masyarakat terhadap penerapan sistem pelayanan transportasi publik terpadu di DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka terdapat beberapa manfaat pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendapatkan informasi pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi oleh DKI Jakarta.
2. Mendapatkan respons masyarakat terhadap penerapan sistem pelayanan transportasi publik terpadu di DKI Jakarta.

1.5 Batasan Penelitian

Permasalahan penelitian yang luas dibahas dalam penelitian ini, maka sangat penting untuk mempersempit fokus permasalahan agar tidak terjadi salah tafsir selama pembahasan. Peneliti ini dapat mencakup berbagai aspek sosial dan pembangunan. Seperti masalah-masalah yang berkaitan bagaimana respons masyarakat terhadap pelayanan sistem transportasi publik terintegrasi.

1.6 Model Operasional Penelitian

Tujuan dari model operasional penelitian skripsi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas dalam skripsi.

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah proses penulisan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai bab awal yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Pustaka dibagi menjadi beberapa bagian sub terkait penelitian terdahulu yang relevan, teori dan konsep yang akan peneliti gunakan. Kemudian kerangka pemikiran. Teori dan konsep yang dipakai dalam penelitian adalah teori interaksi simbolik sebagai acuan dalam penelitian “Respons Masyarakat Terhadap Sistem Transportasi Publik Terintegrasi Di DKI Jakarta”

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian meliputi pemilihan pendekatan penelitian, identifikasi informan yang sesuai, penerapan teknik pengumpulan data yang tepat, penerapan teknik pengolahan dan analisis data yang efektif, serta pertimbangan lokasi dan jadwal pelaksanaan penelitian oleh peneliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah laporan penelitian. Pembahasan bertujuan untuk menyajikan interpretasi terhadap temuan, simpulan, dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Dalam pembahasan, penulis menjelaskan makna temuan dan menyampaikan kemungkinan implikasinya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup yang terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan pada pembahasan penelitian dan saran agar dapat membantu dalam pengembangan penelitian selanjutnya.